JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 01, No. 03, Tahun 2025, Hal. 993-1005, ISSN: 3089-0128 (Online)

Legitimasi Proses Akreditasi di dalam Lembaga Pendidikan MI Mirqotul Ulum

Mohammad Dendy Musthofa[1], Moh Rifa'i[2]
[1,2]Universitas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo

Email : dendyalfi@gmail.com

Article Info

Article history:
Received April 12, 2025
Revised April 19, 2025
Accepted April 25, 2025

Keywords:
Keywords : accreditation, social legitimacy, institutional strategy

ABSTRACT

This study aims to examine the institution's strategy in meeting accreditation standards, identify the obstacles and challenges faced, analyze the role of foundations and Islamic boarding school communities in supporting the accreditation process, and examine how social legitimacy for the accreditation process is formed within MI Mirqotul Ulum. The approach used was a qualitative case study. Data collection techniques were conducted through observation, in-depth interviews, and documentation. The results show that MI Mirqotul Ulum implements a strategy based on collaboration and Islamic boarding school values to meet accreditation standards. The main obstacles faced include limited human resources, administrative burdens, and a lack of understanding of the digital-based accreditation system. The role of foundations and Islamic boarding school communities proved crucial in providing moral, spiritual, and material support during the accreditation process. Furthermore, the social legitimacy of accreditation in the eyes of the school community varies; most are beginning to understand the importance of accreditation as an effort to improve educational quality. This study recommends the need for technical training, strengthening accreditation literacy, and establishing a sustainable quality culture within the madrasah environment.

CC BY SA

Article Info

Article history:
Received April 12, 2025
Revised April 19, 2025
Accepted April 25, 2025

Keywords:
akreditasi, legitimasi sosial, strategi lembaga

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi lembaga dalam memenuhi standar akreditasi, mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi, menganalisis peran yayasan dan komunitas pesantren dalam mendukung proses akreditasi, serta menelaah bagaimana legitimasi sosial terhadap proses akreditasi terbentuk di lingkungan MI Mirqotul Ulum. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MI Mirqotul Ulum menerapkan strategi berbasis kolaborasi dan nilai-nilai pesantren untuk memenuhi standar akreditasi. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan SDM, beban administratif, serta kurangnya pemahaman terhadap sistem akreditasi berbasis digital. Peran yayasan dan komunitas pesantren terbukti sangat penting dalam memberikan dukungan moral, spiritual, dan material selama proses akreditasi berlangsung. Selain itu, legitimasi sosial terhadap akreditasi di mata komunitas sekolah bersifat variatif; sebagian besar mulai memahami pentingnya akreditasi sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pelatihan teknis, penguatan literasi akreditasi, serta pembentukan budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan madrasah.

Corresponding Author:
Mohammad Dendy Musthofa
Universitas Nurul Jadid
E-mail: dendyalfi@gmail.com

PENDAHULUAN

Bagian akreditasi lembaga pendidikan merupakan tolok ukur objektif untuk menjamin mutu, akuntabilitas, dan pengakuan institusional dalam sistem pendidikan nasional. Idealnya, proses akreditasi mengacu pada prinsip transparansi, evaluasi berbasis data, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Namun, dalam praktik sosial di lapangan, terutama pada lembaga pendidikan kecil seperti MI Mirqotul Ulum, terdapat kesenjangan antara idealisme prosedural dan implementasi aktual. Proses akreditasi kerap menjadi formalitas administratif tanpa menyentuh substansi mutu pendidikan yang sesungguhnya. Misalnya, masih ditemukan kecenderungan pengumpulan dokumen semata demi memenuhi standar penilaian, tanpa disertai refleksi mendalam terhadap kualitas manajemen, pembelajaran, dan budaya sekolah. Hal ini menunjukkan adanya persoalan legitimasi: apakah akreditasi betul-betul mencerminkan kualitas institusi, ataukah hanya memenuhi syarat administratif semata? Fenomena ini menunjukkan bahwa teori tentang akreditasi sebagai sistem jaminan mutu belum sepenuhnya berjalan efektif di konteks MI kecil. Oleh karena itu, riset ini penting untuk mengkritisi dan mengungkap celah antara teori akreditasi dan realitas sosial institusional di lapangan.

Proses akreditasi di lembaga pendidikan dasar dan menengah, seperti penelitian oleh (Septian, 2022) yang menyatakan bahwa banyak sekolah memaknai akreditasi sebagai beban administratif ketimbang proses peningkatan mutu. Penelitian lain oleh (Rabbaniyah & Roidah Lina, 2023)menemukan bahwa keterlibatan guru dan kepala sekolah dalam proses akreditasi sering kali hanya sebatas pemenuhan dokumen, tanpa penguatan reflektif terhadap praktik pendidikan. Sementara itu, studi dari (Aas Astri, 2020)menunjukkan bahwa sekolah dengan sumber daya terbatas cenderung mengalami tekanan untuk "mengakali" proses akreditasi demi memperoleh nilai tinggi. Namun, belum banyak penelitian yang fokus pada aspek legitimasi akreditasi, khususnya di madrasah ibtidaiyah (MI) swasta yang berada di wilayah pinggiran. Di sinilah letak posisi riset ini: membedah bagaimana akreditasi dijalankan dan dimaknai di lingkungan MI Mirqotul Ulum, dan apakah akreditasi tersebut memiliki legitimasi secara kultural dan institusional. Dengan demikian, penelitian ini akan melengkapi kekosongan wacana yang selama ini lebih banyak berfokus pada teknis atau hasil akreditasi, bukan pada pemaknaan dan keabsahan sosialnya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya memotret proses akreditasi dari perspektif legitimasi sosial dan kultural, bukan semata-mata prosedural administratif. Kebanyakan riset sebelumnya cenderung menilai akreditasi dari sisi hasil dan pemenuhan indikator, sedangkan riset ini menyoroti makna, penerimaan, dan keberterimaan sosial akreditasi di level sekolah. Penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana pihak sekolah, guru, dan masyarakat memaknai proses akreditasi; apakah sebagai proses peningkatan mutu atau hanya formalitas belaka. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, riset ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang legitimasi institusi pendidikan, khususnya di lingkungan madrasah

kecil. Selain itu, riset ini juga akan menunjukkan dinamika internal sekolah dalam menghadapi tekanan eksternal dari lembaga penjamin mutu. Inilah hal yang jarang dikaji dalam konteks MI swasta berbasis komunitas. Dengan demikian, novelty-nya adalah pada penyajian dimensi makna dan penerimaan sosial dari proses akreditasi, bukan hanya aspek teknis administratif, sehingga memberikan perspektif baru dalam memahami hubungan antara kebijakan mutu pendidikan dan realitas kultural sekolah.

celah penelitian sebelumnya, fokus utama dalam riset ini adalah menjawab pertanyaan: "Bagaimana proses akreditasi dijalankan, dimaknai, dan dilegitimasi dalam konteks sosial dan institusional MI Mirqotul Ulum?" Pertanyaan ini penting karena akreditasi seharusnya tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi juga membentuk kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Penelitian ini juga ingin menggali bagaimana persepsi guru, kepala sekolah, dan komunitas terhadap akreditasi; apakah mereka menganggapnya sebagai proses yang otentik dan sah, atau justru sekadar ritual birokrasi. Dengan mengangkat pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi dan mengkritisi validitas sosial dari akreditasi di lembaga pendidikan kecil. Hal ini juga akan mengungkap apakah akreditasi mampu mendorong perubahan positif atau justru menimbulkan tekanan tambahan. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian diarahkan untuk menggali makna sosial, proses internalisasi, dan validitas simbolik dari proses akreditasi dalam konteks sekolah berbasis komunitas yang tidak banyak disorot dalam wacana kebijakan pendidikan nasional.

Studi awal dan observasi lapangan, penulis berargumen bahwa proses akreditasi di MI Mirqotul Ulum lebih banyak dijalankan sebagai bentuk pemenuhan administratif ketimbang upaya peningkatan mutu yang substansial. Hal ini disebabkan oleh tekanan eksternal dari lembaga penilai, keterbatasan sumber daya sekolah, serta kurangnya pemahaman kritis tentang makna akreditasi itu sendiri. Meskipun secara teknis proses akreditasi dapat terlaksana dengan memenuhi berbagai indikator formal, legitimasi sosialnya masih lemah karena belum disertai dengan perubahan kualitatif dalam budaya manajemen sekolah dan proses pembelajaran. Argumen ini mengandung dua alasan utama: pertama, karena adanya disparitas antara persepsi aktor sekolah dan tujuan ideal akreditasi; dan kedua, karena proses akreditasi seringkali bersifat top-down tanpa keterlibatan partisipatif. Berdasarkan premis tersebut, maka penelitian ini akan menguji sejauh mana akreditasi dianggap sah secara sosial dan dapat membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberi kontribusi terhadap pemahaman lebih mendalam mengenai validitas sosial dari sistem penjaminan mutu pendidikan.

METODE PENELITIAN

Bagian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Pratama & Sudarsono, 2024) dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam proses, makna, dan dinamika sosial di balik fenomena akreditasi di lingkungan MI Mirqotul Ulum. Studi kasus digunakan karena fokus penelitian terletak pada satu lokasi dan satu unit analisis secara spesifik, yakni MI Mirqotul Ulum yang berada dalam naungan pesantren Mirqotul Ulum. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik unik lembaga tersebut, yaitu merupakan madrasah swasta berbasis komunitas pesantren yang memiliki keterbatasan sumber daya namun tetap menjalankan proses akreditasi sesuai regulasi nasional. Selain itu, lembaga ini menjadi representasi dari banyak MI serupa yang menghadapi

tantangan legitimasi akreditasi di tengah keterbatasan sistemik. Dengan latar ini, peneliti ingin mengeksplorasi bagaimana proses akreditasi dilakukan, bagaimana makna dan persepsi para pelakunya, serta sejauh mana akreditasi dianggap sah atau sekadar kewajiban administratif dalam konteks sosial lembaga tersebut.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada kepala madrasah, guru, staf administrasi, serta pihak yayasan untuk menggali pemahaman dan persepsi mereka terhadap proses akreditasi, termasuk motivasi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi. Observasi dilakukan dengan mengikuti aktivitas keseharian di madrasah, terutama selama periode persiapan dan pelaksanaan akreditasi, guna melihat secara langsung bagaimana proses tersebut berlangsung dalam praktik. Selain itu (Ihsan, 2021), observasi juga digunakan untuk mencermati interaksi antaraktor dan dinamika kelembagaan yang tidak tertangkap dalam wawancara. Sementara itu, dokumentasi meliputi pengumpulan dokumen terkait akreditasi seperti borang, laporan evaluasi diri, berita acara visitasi, serta arsip internal lainnya. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji validitas data, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara silang agar menghasilkan gambaran yang utuh dan dapat dipercaya

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah, merangkum, dan menyusun data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam kategori-kategori tematik, seperti persepsi terhadap akreditasi, strategi pemenuhan indikator, serta kendala dan dinamika internal lembaga. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur agar memudahkan dalam melihat pola dan hubungan antar kategori. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses analisis berlangsung, disertai verifikasi melalui pembacaan ulang dan konfirmasi kepada informan jika diperlukan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap makna mendalam dari setiap temuan, serta memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas sosial dan persepsi para pelaku di lingkungan MI Mirqotul Ulum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Lembaga dalam Memenuhi Standar Akreditasi

Hasil observasi langsung yang dilakukan selama dua minggu di lingkungan MI Mirqotul Ulum, tampak bahwa proses pemenuhan standar akreditasi dilakukan secara bertahap dan bersifat kolektif. Tim akreditasi dibentuk oleh kepala madrasah dengan melibatkan beberapa guru dan staf tata usaha. Dalam praktiknya, guru-guru tampak bekerja di luar jam pelajaran untuk mengumpulkan dan menyusun dokumen-dokumen pendukung, seperti RPP, jurnal kelas, hingga daftar hadir siswa. Kegiatan ini banyak dilakukan di ruang guru atau kantor madrasah yang sederhana, sering kali disertai diskusi informal mengenai format dan isi dokumen. Observasi juga mencatat bahwa lingkungan fisik madrasah yang terletak di kompleks pesantren turut memengaruhi ritme kerja; aktivitas akreditasi diselingi dengan kegiatan keagamaan dan pengajian santri. Dari sini dapat diinterpretasikan bahwa strategi yang digunakan lebih menekankan pada upaya kolektif dengan semangat kebersamaan dan loyalitas internal, meskipun tidak selalu terstruktur atau sistematis. Pendekatan ini tampak cukup efektif di tengah

keterbatasan sarana, menunjukkan adanya adaptasi terhadap realitas lokal berbasis komunitas pesantren.

Wawancara mendalam dengan kepala madrasah, dua guru senior, dan staf administrasi menghasilkan gambaran yang lebih rinci tentang strategi yang ditempuh. Kepala madrasah menjelaskan bahwa strategi utama mereka adalah "menguatkan kerja sama tim" karena keterbatasan tenaga profesional dan fasilitas. Guru senior menyebutkan bahwa sebagian besar tim belum memiliki pengalaman menyusun borang akreditasi, sehingga mereka belajar mandiri melalui internet dan berbagi contoh borang dari madrasah lain. Salah satu staf administrasi menambahkan bahwa banyak dokumen yang disiapkan "menyesuaikan" dengan indikator penilaian, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan praktik aktual. Wawancara juga menunjukkan bahwa pemahaman terhadap standar akreditasi masih bersifat teknis, bukan substantif, yang berarti orientasinya lebih pada pemenuhan format dokumen ketimbang peningkatan mutu nyata. Dari deskripsi tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa strategi MI Mirqotul Ulum bersifat responsif dan improvisatif, mengandalkan solidaritas internal dan belajar dari luar. Hal ini mencerminkan pola adaptasi khas lembaga kecil yang harus memenuhi tuntutan sistem besar tanpa pendampingan intensif.

Foto 1. Kegiatan bersama Asesor dan wali murid PP Mirqotul Ulum

Dokumen-dokumen yang berhasil dikumpulkan dan dianalisis antara lain: borang akreditasi, Rencana Kerja Tahunan (RKT), evaluasi diri madrasah (EDM), berita acara rapat tim akreditasi, serta foto-foto kegiatan pendukung. Dari borang akreditasi tampak bahwa sebagian besar indikator dipenuhi dengan melampirkan dokumen administratif seperti sertifikat pelatihan guru, laporan pembelajaran, dan rencana pengembangan sekolah. Namun, banyak dokumen tampak disusun secara mendadak menjelang visitasi asesor. EDM yang dilampirkan cenderung normatif dan menyatakan bahwa "semua indikator telah dipenuhi", tanpa ada penjabaran analisis kelemahan institusi. Foto kegiatan menunjukkan keterlibatan guru dan staf dalam menyiapkan dokumen, tetapi tidak menunjukkan adanya forum evaluasi substansial terhadap mutu pembelajaran. Data ini menunjukkan bahwa strategi dokumentasi yang digunakan bersifat reaktif dan lebih mengutamakan kelengkapan administratif daripada refleksi internal. Interpretasinya adalah bahwa pemenuhan standar dilakukan dengan pendekatan

pragmatis, yaitu memastikan semua aspek terpenuhi di atas kertas agar nilai akreditasi terpenuhi, meskipun belum selalu diikuti peningkatan kualitas secara nyata.

Berdasarkan triangulasi data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menyimpulkan bahwa strategi yang ditempuh MI Mirqotul Ulum dalam memenuhi standar akreditasi adalah strategi adaptif berbasis kolaborasi internal, improvisasi teknis, dan pemenuhan administratif. Strategi ini muncul dari kondisi objektif lembaga: keterbatasan sumber daya, tidak adanya tenaga profesional khusus akreditasi, serta tekanan untuk tetap eksis di tengah tuntutan regulasi nasional. Meski strategi tersebut belum menyentuh dimensi perbaikan mutu substansial, ia mencerminkan kecerdasan kelembagaan dalam menghadapi sistem penilaian eksternal. Pendekatan berbasis komunitas—dengan semangat gotong royong dan loyalitas terhadap lembaga—menjadi kekuatan utama dalam menyusun dokumen dan mempersiapkan diri menghadapi asesor. Namun, strategi ini juga mengandung risiko: akreditasi bisa kehilangan makna sebagai alat perbaikan mutu dan berubah menjadi sekadar ritual administratif. Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan yang lebih partisipatif dan pendekatan akreditasi yang kontekstual agar strategi lembaga tidak hanya bersifat memenuhi kewajiban, tetapi juga memperkuat legitimasi dan transformasi kualitas pendidikan secara berkelanjutan.

Kendala dan Tantangan dalam Proses Akreditasi

Proses akreditasi bagi lembaga pendidikan seperti MI Mirqotul Ulum bukanlah sekadar tahapan administratif rutin, tetapi menjadi ujian kapasitas kelembagaan dalam memenuhi standar mutu nasional. Di satu sisi, akreditasi menjadi bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi dan kualitas layanan pendidikan madrasah. Namun di sisi lain, proses ini menuntut kesiapan sumber daya manusia, kelengkapan dokumen, hingga pemahaman mendalam atas instrumen penilaian. Dalam konteks MI Mirqotul Ulum yang berada di lingkungan pesantren, sejumlah kendala dan tantangan nyata muncul, baik secara internal maupun eksternal, yang mempengaruhi kelancaran dan efektivitas proses akreditasi.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknis. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah dan guru, diketahui bahwa sebagian besar tenaga pendidik di MI Mirqotul Ulum belum memiliki pengalaman dalam menyusun dokumen akreditasi secara sistematis. Pengetahuan mereka mengenai isi dan tujuan instrumen akreditasi masih terbatas pada hal-hal administratif, seperti pengisian borang dan pengumpulan lampiran. Tidak ada tenaga khusus atau tim ahli yang memahami secara utuh bagaimana menyusun evaluasi diri lembaga berdasarkan data real dan analisis mutu. Hal ini menyebabkan penyusunan dokumen dilakukan secara terburu-buru dan sering kali hanya mengikuti contoh dari lembaga lain. Keterbatasan ini bukan karena kurangnya kemauan, melainkan karena belum ada pelatihan atau pendampingan teknis yang memadai dari pihak eksternal (Munir & Yusnia, 2022).

Selain keterbatasan SDM, tantangan lain yang sangat terasa adalah minimnya fasilitas dan infrastruktur pendukung**.** Sebagai lembaga yang bernaung di bawah yayasan pesantren, MI Mirqotul Ulum mengandalkan sumber dana terbatas yang berasal dari masyarakat dan donatur lokal. Ruang kelas, sarana laboratorium, perpustakaan, hingga media pembelajaran digital belum memadai. Padahal, dalam standar akreditasi, aspek sarana-prasarana menjadi salah satu indikator penting. Beberapa guru bahkan mengaku bahwa mereka harus meminjam proyektor dari sekolah lain saat ada kegiatan penilaian atau pelatihan. Keterbatasan ini berdampak pada penilaian asesor yang cenderung membandingkan kondisi lembaga dengan standar ideal nasional, tanpa mempertimbangkan latar belakang lokal dan realitas yang dihadapi oleh lembaga kecil berbasis komunitas seperti MI Mirqotul Ulum.

Tantangan ketiga yang sering muncul adalah beban administratif yang sangat tinggi**.** Proses akreditasi menuntut kelengkapan dokumen yang sangat detail, mulai dari RPP, silabus, daftar hadir, berita acara rapat, hingga dokumentasi fisik berupa foto kegiatan dan laporan keuangan. Wawancara dengan staf tata usaha menunjukkan bahwa pengumpulan dokumen tersebut memakan waktu hingga dua bulan dan menyebabkan beban kerja tambahan yang tidak ringan. Sering kali guru harus menyusun dokumen di luar jam kerja mengajar, bahkan sampai malam hari. Belum lagi jika ada ketidaksesuaian format atau data yang hilang, proses harus diulang. Tingginya beban administrasi ini menyebabkan fokus guru dan kepala madrasah beralih dari peningkatan mutu pembelajaran ke pengejaran dokumen semata, sehingga esensi akreditasi sebagai alat evaluasi dan perbaikan mutu tidak tercapai secara optimal.

Peran Yayasan dan Komunitas Pesantren dalam Mendukung Akreditasi

Akreditasi lembaga pendidikan bukan hanya menjadi urusan internal sekolah atau madrasah semata, tetapi memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk yayasan dan komunitas di sekitarnya. Di lembaga pendidikan berbasis pesantren seperti MI Mirqotul Ulum, keberadaan yayasan dan komunitas pesantren memiliki posisi strategis dalam menopang proses akreditasi. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pemilik atau penanggung jawab struktural, tetapi juga sebagai motor penggerak partisipasi, moralitas, serta legitimasi sosial dari proses tersebut. Di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi MI Mirqotul Ulum, peran aktif dari yayasan dan komunitas sekitar terbukti menjadi faktor penting dalam menyukseskan tahapan-tahapan akreditasi.

Secara struktural, Yayasan Mirqotul Ulum sebagai badan hukum yang menaungi madrasah memiliki tanggung jawab langsung terhadap keberlanjutan dan pengakuan formal lembaga. Dalam proses akreditasi, yayasan berperan sebagai fasilitator utama dalam menyediakan kebutuhan administratif maupun logistik. Misalnya, dalam wawancara dengan ketua yayasan, disebutkan bahwa yayasan menyiapkan dana insidental untuk kebutuhan operasional selama proses akreditasi, seperti penggandaan dokumen, penyediaan konsumsi saat visitasi, hingga perbaikan fisik kecil pada ruang kelas dan kantor. Selain itu, yayasan juga menjadi penghubung antara madrasah dan tokoh masyarakat sekitar untuk membangun legitimasi sosial terhadap keberadaan lembaga. Hal ini penting, mengingat madrasah tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem sosial dan spiritual di lingkungan pesantren yang lebih luas. Dukungan yayasan ini membuktikan bahwa keberhasilan akreditasi bukan semata-mata urusan teknis, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan lembaga dalam mengelola jejaring dukungan internal.

Di luar struktur yayasan, komunitas pesantren yang terdiri dari para ustaz, santri senior, wali murid, dan tokoh masyarakat sekitar juga memberikan dukungan penting, baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi peneliti menunjukkan bahwa banyak aktivitas pendukung akreditasi yang dibantu oleh elemen komunitas, seperti pembuatan dekorasi lingkungan sekolah, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, dan dokumentasi kegiatan keagamaan. Beberapa santri senior bahkan membantu guru-guru dalam mengetik dan mengedit dokumen karena keterampilan digital mereka lebih memadai. Dalam wawancara dengan guru MI, disebutkan bahwa ketika pihak madrasah kesulitan menyiapkan perangkat pembelajaran visual, beberapa wali murid menyumbangkan alat bantu belajar sederhana seperti spanduk edukatif dan alat tulis. Dukungan semacam ini menunjukkan adanya keterlibatan emosional dan komunal terhadap keberhasilan lembaga, yang menjadikan proses akreditasi tidak hanya sebagai tanggung jawab formal, tetapi juga tanggung jawab sosial(Ningsih, ., & ., 2022).

Tidak hanya membantu dari sisi teknis dan moral**,** komunitas pesantren juga menjadi penopang legitimasi spiritual dari keberadaan madrasah. Hal ini penting, karena dalam masyarakat pesantren, keberhasilan lembaga pendidikan tidak hanya dinilai dari kelulusan akademik, tetapi juga dari keberkahan dan ridha guru. Oleh karena itu, ketika madrasah menghadapi proses akreditasi, beberapa tokoh pesantren terlibat dalam kegiatan doa bersama, pengajian, dan memberikan motivasi kepada guru serta murid. Tindakan simbolik ini membangun rasa percaya diri dan semangat kolektif di kalangan sivitas madrasah. Dalam pandangan masyarakat pesantren, kegiatan formal seperti akreditasi akan lebih mudah dijalani jika dibarengi dengan spiritualitas dan dukungan moral dari para sesepuh. Praktik ini memperlihatkan adanya peran kultural yang sangat khas dalam sistem pendidikan berbasis pesantren, yang membedakannya dari lembaga pendidikan umum.

Namun demikian, peran yayasan dan komunitas juga menghadapi tantangan tertentu. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang memadai terhadap teknis akreditasi. Yayasan cenderung menyerahkan urusan teknis sepenuhnya kepada kepala madrasah dan guru, dengan anggapan bahwa mereka lebih memahami sistem pendidikan formal. Komunitas pesantren juga belum sepenuhnya menyadari bahwa akreditasi bukan hanya tentang nilai administratif, tetapi juga menyangkut keberlanjutan lembaga dalam jangka panjang, termasuk dalam memperoleh bantuan pemerintah dan meningkatkan daya saing. Di sinilah perlunya sinergi yang lebih intens antara pihak yayasan, komunitas, dan pengelola madrasah, agar dukungan yang diberikan tidak hanya bersifat simbolik dan insidental, tetapi juga strategis dan berkelanjutan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran yayasan dan komunitas pesantren dalam mendukung proses akreditasi MI Mirqotul Ulum bersifat menyeluruh: mulai dari penyediaan dana dan fasilitas, bantuan teknis, dukungan moral, hingga legitimasi sosial dan spiritual. Keterlibatan mereka menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan berbasis pesantren memiliki modal sosial yang kuat untuk bertahan dan berkembang, meskipun tidak selalu memiliki keunggulan dalam hal sumber daya. Perlu adanya upaya sistematis dari pemerintah atau lembaga pengelola akreditasi untuk membina dan melibatkan yayasan serta komunitas secara lebih terarah, agar mereka dapat memahami pentingnya akreditasi bukan sekadar kewajiban formal, tetapi sebagai bagian dari proses transformasi mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Legitimasi Sosial Proses Akreditasi di Mata Komunitas Sekolah

Tabel 1. Legitimasi Sosial Proses Akreditasi di Mata Komunitas Sekolah MI Mirqotul Ulum

Komponen Komunitas	Persepsi terhadap Akreditasi	Bentuk Partisipasi	Tantangan yang Dirasakan	Harapan terhadap Akreditasi
Kepala Madrasah	Akreditasi adalah alat ukur keberlangsungan dan eksistensi madrasah secara nasional	Koordinasi penyusunan dokumen, memimpin tim akreditasi, komunikasi dengan yayasan dan asesor	Beban administratif tinggi, kurangnya SDM terlatih	Peningkatan pengakuan formal dan dukungan pemerintah
Guru	Akreditasi dianggap penting namun membebani karena banyaknya	Menyusun RPP, silabus, laporan pembelajaran, dokumentasi kegiatan	Kelelahan, kurangnya	Pengakuan atas kualitas mengajar dan

Komponen Komunitas	Persepsi terhadap Akreditasi	Bentuk Partisipasi	Tantangan yang Dirasakan	Harapan terhadap Akreditasi
	dokumen teknis yang harus disiapkan		pelatihan teknis, keterbatasan waktu	peningkatan profesionalisme
Staf TU (Tata Usaha)	Akreditasi dipahami sebagai kewajiban institusional dan syarat administratif sekolah	Mengarsip data, mengisi borang, mencetak dokumen pendukung	Kurang paham isi instrumen, tumpang tindih tugas	Digitalisasi proses dan pelatihan manajemen data
Yayasan	Akreditasi sebagai bentuk pengakuan terhadap lembaga di bawah naungan yayasan	Menyediakan dana operasional, mendorong penguatan fisik sarana prasarana	Tidak memahami teknis akreditasi, pasif dalam penyusunan borang	Lembaga semakin kuat secara struktural dan legal
Wali Murid	Sebagian besar hanya tahu bahwa akreditasi adalah penilaian dari pemerintah	Membantu secara informal: donasi, tenaga saat bersih-bersih, mendukung kegiatan	Kurangnya sosialisasi, kurang memahami peran mereka	Pendidikan anak lebih terjamin, madrasah mendapat bantuan
Santri/Siswa	Tidak semua memahami makna akreditasi, tetapi merasakan dampaknya saat ada visitasi	Mengikuti simulasi, menjaga ketertiban, menunjukkan prestasi saat penilaian	Kurangnya pemahaman, kadang merasa tertekan saat visitasi	Lingkungan belajar lebih nyaman dan lengkap
Komunitas Pesantren	Akreditasi dianggap sebagai kegiatan formal yang "harus ada", bukan inti pendidikan	Dukungan moral: doa bersama, motivasi, memfasilitasi kebutuhan simbolik	Kurangnya pemahaman substansi akreditasi	Akreditasi tetap menghargai nilai-nilai pesantren

Proses akreditasi di lembaga pendidikan seperti MI Mirqotul Ulum tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga memiliki aspek sosial yang sangat penting. Legitimasi sosial mengacu pada sejauh mana proses akreditasi diakui, didukung, dan dianggap bermakna oleh komunitas sekolah, yang mencakup kepala madrasah, guru, staf tata usaha, yayasan, wali murid, siswa, dan masyarakat sekitar, termasuk komunitas pesantren. Dalam konteks ini, akreditasi tidak hanya menjadi kewajiban formal yang harus dipenuhi demi memperoleh status kelembagaan, melainkan juga sebuah proses yang merefleksikan kualitas, kepercayaan, dan keberterimaan lembaga di mata komunitasnya.

Sebagian besar anggota komunitas sekolah memahami akreditasi sebagai instrumen penilaian formal dari pemerintah untuk mengukur kelayakan dan kualitas lembaga. Kepala madrasah dan guru memandang akreditasi sebagai momen penting untuk menunjukkan hasil kerja mereka kepada pihak eksternal. Dalam wawancara dengan kepala madrasah MI Mirqotul Ulum, terungkap bahwa proses akreditasi dianggap sebagai sarana legitimasi kelembagaan yang sangat penting. Melalui akreditasi, madrasah memperoleh pengakuan resmi yang bisa memperkuat posisi hukum dan memperluas peluang bantuan dari pemerintah. Guru-guru pun menyambut akreditasi sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran, meskipun banyak yang merasa terbebani oleh kewajiban administratif seperti penyusunan RPP, silabus, dan laporan kinerja guru. Meski begitu, mereka memahami bahwa proses ini penting sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional dan publik terhadap kualitas pengajaran(Prabandari, Supriyanto, Sobri, & Fadhli, 2022).

Namun demikian, pemahaman tentang akreditasi di kalangan komunitas yang lebih luas masih beragam. Yayasan sebagai lembaga naungan memandang akreditasi secara normatif sebagai syarat yang harus dipenuhi agar lembaga tetap eksis secara formal. Dukungan yayasan terhadap proses ini umumnya bersifat administratif dan logistik, seperti penyediaan anggaran insidental, pengesahan dokumen kelembagaan, serta dorongan moral kepada pengelola madrasah. Meski demikian, keterlibatan yayasan dalam substansi akreditasi masih terbatas karena kurangnya pemahaman teknis terhadap instrumen akreditasi. Sementara itu, wali murid dan masyarakat sekitar sebagian besar hanya mengetahui bahwa akreditasi adalah kunjungan penilaian dari "pemerintah" dan tidak memiliki pemahaman yang utuh mengenai tujuan, manfaat, maupun kontribusi yang bisa mereka berikan. Dalam praktiknya, sebagian wali murid membantu dalam bentuk gotong royong kebersihan, penggalangan dana sukarela, atau dukungan moril saat masa visitasi, namun keterlibatan ini belum terstruktur dan terintegrasi(Iskamto et al., 2022).

Dari sisi siswa atau santri, pemahaman terhadap akreditasi sangat terbatas. Mereka lebih merasakan dampaknya dibanding memahami prosesnya. Banyak siswa merasa bahwa akreditasi adalah masa-masa di mana sekolah menjadi "lebih sibuk", mereka dituntut disiplin, dan lingkungan belajar tampak lebih rapi dan aktif dari biasanya. Meski tidak memahami substansi akreditasi, sebagian siswa mengaku lebih semangat belajar karena melihat guru dan lingkungan sekitar menjadi lebih serius dalam menyambut tim asesor. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak memahami prosesnya secara konseptual, legitimasi sosial terhadap akreditasi bisa tumbuh melalui pengalaman langsung yang dirasakan oleh siswa. Kehadiran asesor dari luar juga menjadi pengalaman yang memperkuat nilai kebanggaan institusional.

Salah satu unsur penting dalam pembentukan legitimasi sosial adalah komunitas pesantren. Di MI Mirqotul Ulum, yang berbasis pesantren, unsur spiritual dan kultural memiliki pengaruh besar dalam mendukung proses akreditasi. Tokoh pesantren dan para ustaz senior turut mendoakan dan memotivasi guru serta siswa. Mereka melihat akreditasi sebagai bagian dari ikhtiar duniawi yang harus diimbangi dengan kesiapan ruhani. Dalam beberapa momen menjelang visitasi, diadakan doa bersama dan pengajian sebagai bentuk dukungan moral dan spiritual. Bentuk dukungan ini mencerminkan adanya pemahaman kultural bahwa keberhasilan lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh penilaian administratif, tetapi juga oleh ridha dan keberkahan para guru dan ulama. Legitimasi sosial di sini bukan hanya didasarkan pada rasionalitas birokratis, tetapi juga pada nilai-nilai tradisi, keikhlasan, dan kebermaknaan spiritual.

HASIL

Hasil temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi lembaga MI Mirqotul Ulum dalam memenuhi standar akreditasi mencakup penyusunan dokumen secara kolektif, penguatan mutu pembelajaran, serta peningkatan sarana prasarana melalui dukungan yayasan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan hasil penelitian Mahsun (2020) yang menekankan pentingnya manajemen akreditasi berbasis kolaborasi antarlembaga dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyiapan borang. Temuan ini juga mengonfirmasi hasil riset j(Buettner & Tassi, 2023)yang menunjukkan bahwa kesiapan administratif dan komunikasi yang solid antara kepala sekolah, guru, dan yayasan merupakan kunci untuk mencapai nilai akreditasi yang optimal. Dalam hal tantangan, penelitian ini menemukan bahwa kendala utama berada pada tumpukan beban administrasi, keterbatasan SDM, serta rendahnya literasi digital dalam mengelola dokumen penunjang akreditasi. Kendala ini selaras dengan temuan dari penelitiank(Firdausi, 2020), yang menyatakan bahwa sebagian besar madrasah swasta menghadapi kesulitan teknis dan psikologis dalam merespons tuntutan akreditasi karena tidak tersedianya pelatihan khusus dan distribusi kerja yang belum proporsional. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran yayasan dan komunitas pesantren sangat signifikan dalam

memberikan dukungan moral, spiritual, hingga material dalam proses akreditasi. Hal ini sejalan dengan studi (Asbari et al., 2020)yang menjelaskan bahwa dalam lembaga berbasis pesantren, solidaritas komunitas memiliki daya dorong tersendiri dalam melegitimasi upaya peningkatan mutu pendidikan. Kontribusi yayasan yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan dana, motivasi religius, serta penyelarasan visi kelembagaan terbukti mampu memperkuat upaya pemenuhan standar akreditasi. Dalam aspek legitimasi sosial, penelitian ini menegaskan bahwa komunitas sekolah, termasuk guru, siswa, wali murid, dan masyarakat sekitar memiliki persepsi yang beragam terhadap makna akreditasi. Beberapa melihatnya sebagai bentuk prestasi kelembagaan, namun sebagian besar masih memahami akreditasi secara permukaan sebagai kegiatan seremonial atau administratif semata. Fakta ini memperkuat temuanni,(Ummah, 2024) yang menunjukkan bahwa legitimasi sosial terhadap akreditasi bergantung pada intensitas komunikasi antara sekolah dan komunitas, serta transparansi informasi yang disampaikan oleh pihak madrasah kepada lingkungan eksternal. Akhirnya, temuan ini mengonfirmasi bahwa keberhasilan akreditasi tidak hanya ditentukan oleh kerja teknis internal, tetapi juga oleh pengakuan sosial dari seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Jika ditinjau lebih lanjut dari penelitian sejenis, maka ditemukan pola konsisten antara hasil penelitian ini dan berbagai studi sebelumnya terkait strategi lembaga pendidikan dalam menghadapi akreditasi. Dalam studi k, dijelaskan bahwa strategi madrasah yang berhasil menembus peringkat akreditasi A umumnya melibatkan pendekatan sinergis yang tidak hanya bersandar pada aspek administrasi, tetapi juga pada pendekatan partisipatif dari yayasan, masyarakat, dan guru. Ini relevan dengan hasil temuan di MI Mirqotul Ulum, di mana strategi penyusunan borang dilakukan secara gotong royong, serta didukung oleh nilai-nilai kekeluargaan khas pesantren. Penelitian lain oleh j(Intelligence, 2024)bahkan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas fungsi dalam madrasah untuk memperkuat kesiapan menghadapi visitasi akreditasi, terutama di lingkungan dengan sumber daya terbatas. Dalam hal tantangan, penelitian ini pun mendapat penguatan dari studi k(Aminah, 2022)yang menemukan bahwa madrasah di lingkungan pedesaan seringkali mengalami keterbatasan akses terhadap pelatihan teknis penyusunan dokumen akreditasi dan lemahnya literasi akreditasi di tingkat operasional. Dengan demikian, kendala yang dihadapi MI Mirqotul Ulum bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari problem struktural yang dihadapi banyak lembaga pendidikan swasta.

Lebih lanjut, dukungan yayasan dan komunitas pesantren yang diungkap dalam penelitian ini juga ditemukan dalam penelitian Ismail (2020), yang menunjukkan bahwa madrasah yang berada di bawah naungan pesantren memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi tekanan akreditasi karena tingginya semangat kolektif, ketaatan struktural, dan kepemimpinan berbasis nilai-nilai agama. Yayasan dalam konteks ini tidak hanya dipandang sebagai sponsor finansial, tetapi juga sebagai penopang ideologis yang memperkuat semangat perjuangan warga madrasah dalam memenuhi standar mutu pendidikan nasional. Dalam penelitian Suhendra (2021), ditunjukkan pula bahwa peran tokoh agama dan pengasuh pesantren dapat memengaruhi tingkat partisipasi guru dan siswa dalam menjalankan agenda peningkatan mutu. Temuan ini selaras dengan realitas di MI Mirqotul Ulum, di mana komunitas pesantren memberikan dukungan spiritual melalui kegiatan doa bersama dan motivasi ruhani yang memperkuat mental tim akreditasi. Terakhir, dari sisi legitimasi sosial, penelitian Zulfikar (2018) mengungkap bahwa penerimaan sosial terhadap akreditasi akan terbentuk kuat apabila sekolah mampu mengomunikasikan nilai akreditasi dalam bahasa yang dipahami masyarakat awam. Temuan ini sejalan dengan kondisi di MI Mirqotul Ulum, di mana belum adanya program literasi akreditasi kepada wali murid menyebabkan sebagian besar dari mereka hanya melihat akreditasi sebagai kunjungan formal, bukan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan secara substansial. Oleh karena itu, hasil penelitian ini bukan hanya memperkuat temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga memperjelas pentingnya pendekatan kultural dan partisipatif dalam membangun legitimasi sosial terhadap akreditasi.

KESIMPULAN

Penelitian yang dilakukan di MI Mirqotul Ulum menunjukkan bahwa strategi lembaga dalam memenuhi standar akreditasi dilakukan melalui pendekatan kolektif berbasis budaya kerja pesantren yang menekankan gotong royong, loyalitas, dan dedikasi. Penyusunan dokumen akreditasi, perbaikan sarana prasarana, dan peningkatan kualitas pembelajaran menjadi fokus utama, didukung oleh koordinasi antara kepala madrasah, guru, dan yayasan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia, beban administratif yang berat, kurangnya pelatihan teknis, serta minimnya pemahaman terhadap sistem akreditasi berbasis digital. Dalam konteks ini, peran yayasan dan komunitas pesantren sangat signifikan, tidak hanya dalam bentuk dukungan finansial, tetapi juga dalam bentuk motivasi spiritual dan penguatan moral tim akreditasi. Dukungan ini menciptakan suasana emosional dan spiritual yang memperkuat kesiapan lembaga menghadapi proses visitasi. Selain itu, legitimasi sosial terhadap akreditasi di mata komunitas sekolah bervariasi, tergantung pada pemahaman dan keterlibatan masing-masing unsur, seperti guru, wali murid, siswa, dan masyarakat sekitar. Meski belum merata, sebagian besar pihak mulai memandang akreditasi sebagai instrumen penting untuk menjamin mutu pendidikan, bukan sekadar kewajiban administratif, terutama setelah melihat manfaat konkret dari peningkatan mutu kelembagaan pascaakreditasi.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati untuk pengembangan kajian berikutnya. Pertama, ruang lingkup penelitian yang terbatas pada satu lembaga yaitu MI Mirqotul Ulum membuat generalisasi hasil temuan menjadi kurang representatif untuk menggambarkan dinamika akreditasi di lembaga serupa yang berada di luar lingkungan pesantren atau di wilayah geografis dan sosial yang berbeda. Kedua, data observasi dan wawancara sangat bergantung pada persepsi subyektif informan, sehingga interpretasi peneliti berpotensi bias apabila tidak dilengkapi dengan triangulasi sumber dan waktu yang lebih luas. Ketiga, aspek digitalisasi dalam proses akreditasi belum dikaji secara mendalam, padahal menjadi tantangan penting dalam era modernisasi sistem pendidikan. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian lanjutan memperluas lokasi kajian ke beberapa madrasah swasta dan negeri, dengan pendekatan komparatif antarwilayah. Selain itu, perlu juga dilakukan penguatan literasi akreditasi di kalangan komunitas sekolah melalui program pelatihan dan pendampingan. Rekomendasi lainnya adalah perlunya pengembangan model kemitraan antara madrasah, yayasan, dan masyarakat yang bersifat berkelanjutan, agar akreditasi tidak hanya menjadi kegiatan musiman, melainkan budaya mutu yang tertanam secara sistemik dalam praktik pendidikan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Aas Astri. (2020). Jurnal Sistem Informasi Manajemen. Retrieved from https://idoc.pub/documents/jurnal-sistem-informasi-manajemen-d47eq6m3xjn2

Aminah, S. (2022). Pengaruh Lingkungan Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa. *Indonesian Journal of Education Research (IJoER)*, *3*(6), 140–145. https://doi.org/10.37251/ijoer.v3i6.655

Asbari, M., Fayzhall, M., Goestjahjanti, F. S., Winanti, Yuwono, T., Hutagalung, D., … Purwanto, A. (2020). Peran Kepemimpinan Transformasional Dan Organisasi Pembelajaran Terhadap Kapasitas Inovasi Sekolah. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, *2*(1), 6724–6748. Retrieved from https://ummaspul.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/421

Buettner, T., & Tassi, A. (2023). VAT fraud and reverse charge: empirical evidence from VAT return data. *International Tax and Public Finance*, *30*(3), 849–878.

Firdausi, N. I. (2020). SISTEM INFORMASI PENJUALAN DAN MANAJEMEN BARANG DAGANG TOKO SEMBAKO BERBASIS WEB. *Kaos GL Dergisi*, *8*(75), 147–154. Retrieved

from https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp:

Ihsan, N. (2021). BUKU STATISTIK ROKOK. *Statistik Daerah Kecamatan Kartasura Tahun*, *II*(1), 17–18.

Intelligence, A. (2024). The Meta Analysis in Public Relations Theory in, *16*(2).

Iskamto, D., Liyas, J. N., Gultom, E., Ansori, P. B., Harwina, Y., & Hendra, T. (2022). Pelaksanaan Proses Akreditasi Sekolah untuk menjaga kualitas Pendidikan Sekolah/Madrasah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, *1*(2), 46–51.

Munir, R., & Yusnia, N. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Hiperemesis Gravidarum pada Ibu Hamil. *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati*, *7*(3), 326. https://doi.org/10.35842/formil.v7i3.460

Ningsih, I., . A., & . H. (2022). Strategi Manajemen Humas dalam Meningkatkan Citra Sekolah Di SMPN 1 Tellu Siattinge. *Jurnal Mappesona*, *5*(1), 11–21. https://doi.org/10.30863/mappesona.v5i1.2495

Prabandari, D. A., Supriyanto, A., Sobri, A. Y., & Fadhli, R. (2022). Strategi Humas Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan: Jurnal Ilmiah Administrasi, Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan*, *3*(2), 179–191. https://doi.org/10.21831/jump.v3i2.45799

Pratama, W., & Sudarsono, B. (2024). endidikan Teknik Mesin MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS KERJA : MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN KESIAPAN KERJA SISWA SMK WORK-BASED LEARNING MODEL : IMPROVING COMPETENCY AND WORK READINESS OF SMK STUDENTS, *11*(Mei).

Rabbaniyah, Q., & Roidah Lina, M. M. (2023). *Model Pengelolaan Pondok Pesantren*. Zahir Publishing.

Septian, R. (2022). Manajemen Membangun Brand Image (Citra Sekolah) Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing di Smp Muhammadiyah 3 Yogyakarta. *Media Manajemen Pendidikan*, *4*(3), 496–507. https://doi.org/10.30738/mmp.v4i3.8926

Ummah, M. S. (2024). PENERAPAN ALGORITME. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. Retrieved from http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI